

BAB III

GAMBARAN EMPIRIK DI LOKASI MAGANG

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Bangka

3.1.1 Keadaan Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pj. Gubernur yakni H. Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi.

Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, sedangkan Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Di bagian utara provinsi ini terdapat Laut Cina Selatan, bagian selatan adalah Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di bagian timur yang dipisahkan dari Pulau Belitung oleh Selat Karimata.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatra Selatan.

Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama Pulau Bangka berganti-ganti menjadi daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah kapitulasi dengan Belanda, Kepulauan Bangka Belitung menjadi jajahan Inggris sebagai "Duke of Island". 20 Mei 1812 kekuasaan Inggris berakhir setelah konvensi London 13 Agustus 1824, terjadi peralihan kekuasaan daerah jajahan Kepulauan Bangka Belitung antara MH. Court (Inggris) dengan K. Hcyes (Belanda) di Muntok pada 10 Desember 1816. Kekuasaan Belanda mendapat perlawanan Depati Barin dan putranya Depati Amir yang di kenal sebagai perang Depati Amir (1849-1851).

Kekalahan perang Depati Amir menyebabkan Depati Amir diasingkan ke Desa Air Mata Kupang NTT. Atas dasar stbl. 565, tanggal 2 Desember 1933 pada tanggal 11 Maret 1933 di bentuk Resindetil Bangka Belitung Onderhoregenheden yang dipimpin seorang residen Bangka Belitung dengan 6 Onderafdehify yang di pimpin oleh Ast. Residen. Di Pulau Bangka terdapat 5 Onderafdehify yang akhirnya menjadi 5 Karesidenan sedang di Pulau Belitung terdapat 1 Karesidenan. Di zaman Jepang, Karesidenan Bangka Belitung di perintah oleh pemerintahan Militer Jepang yang disebut Bangka Beliton Ginseibu. Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, oleh Belanda di bentuk Dewan Bangka Sementara pada 10 Desember 1946(stbl.1946 No.38) yang selanjutnya resmi menjadi Dewan Bangka yang diketuai oleh Musarif Datuk Bandaharo Leo yang dilantik Belanda pada 11 November 1947.

Dewan Bangka merupakan Lembaga Pemerintahan Otonomi Tinggi. Pada 23 Januari 1948 (stb1.1948 No.123), Dewan Bangka, Dewan Belitung dan Dewan Riau bergabung dalam Federasi Bangka Belitung dan Riau (FABERI) yang merupakan suatu bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 141 Tahun 1950 kembali bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga berlaku undang-undang Nomor 22 Tahun 1948. Pada tanggal 22 April 1950 oleh Pemerintah diserahkan wilayah Bangka Belitung kepada Gubernur Sumatera Selatan Dr. Mohd. Isa yang disaksikan oleh Perdana Menteri Dr. Hakim dan Dewan Bangka Belitung

dibubarkan. Sebagai Residen Bangka Belitung ditunjuk R. Soemardja yang berkedudukan di Pangkalpinang. Berdasarkan UUDS 1950 dan UU Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Darurat Nomor 4 tanggal 16 November 1956 Karesidenan Bangka Belitung berada di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Bangka dan dibentuk juga kota kecil Pangkalpinang. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 Pangkalpinang menjadi Kota Praja.

Pada tanggal 13 Mei 1971 Presiden Soeharto meresmikan Sungai Liat sebagai ibukota Kabupaten Bangka. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2000 wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya sejak tanggal 27 Januari 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemekaran wilayah dengan menambah 4 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Bangka Selatan.

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang 302.879,47 Ha atau 3.028,794 Km². Dengan luas daratan tanpa pulau kecil dan kepulauan Tujuh 3.021 Km² atau 302.100 Ha.

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna.

Tabel 3.1
Letak dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka

Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase	Jumlah desa	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.Sungailiat	147	4.87	1	6
02.Belinyu	515	17.05	5	3
03.Merawang	215	7.12	10	0
04.Mendo Barat	684	22.64	15	0
05.Pemali	140	4.63	6	0
06.Puding Besar	271	8.97	7	0
07.Bakam	425	14.07	9	0
08.Riau Silip	624	20.65	9	0
Jumlah/Total	3021	100.00	62	9

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka

3.1.2 Keadaan Alam

3.1.2.1 Keadaan Iklim

Kabupaten Bangka beriklim tropis Type A dengan variasi curah hujan antara 4 hingga 466.2 mm tiap bulan untuk tahun 2012, dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus dan curah hujan tertinggi pada bulan Februari.

Suhu rata-rata daerah Kabupaten Bwangka berdasarkan data Stasiun Meteorologi Pangkalpinang menunjukkan variasi antara 26.1° Celcius hingga 28.0 ° Celcius. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 74 hingga 87 persen pada tahun 2012.

Sementara intensitas penyinaran matahari rata-rata pada tahun 2012 rata-rata bervariasi antara 27.6 hingga 82.3 persen dan tekanan udara rata-rata antara 1009,3 hingga 1011,5 mb.

3.1.2.2 Keadaan Tanah

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH di bawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung, dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut:

- a. 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 Meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.
- b. 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Cokelat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.
- c. 20% Lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya Asosiasi Podsolik berasal dari Komplek batu Pasir dan Kwarsit.

- d. 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

3.1.2.3 Hidrologi

Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka antara lain adalah : Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain.

Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut.

Pada dasarnya di Daerah Kabupaten Bangka tidak ada danua alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut *kolong*.

3.1.3 Flora dan Fauna

3.1.3.1 Fauna

Dikawasan hutan terdapat binatang liar seperti: Rusa, Beruk, Monyet, Lutung, Babi, Tringgiling, Pelanduk, Musang, Murai, Tekukur, Pipit, Kalong, elang, Ayam Hutan, tetapi tidak terdapat binatang buas seperti Gajah, Harimau dan lain-lain sebagainya.

3.1.3.2 Flora

Tumbuhan hutan terdapat bermacam-macam kayu seperti : Kayu Ramin, Meranti, Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Bitanggor, Meranti Rawa, Cempedak Air, Mahang, Bakau dan lain-lain sebagainya.

3.1.4 Jarak dari Sungailiat ke Ibu Kota Kabupaten atau Propinsi

Jarak yang paling jauh dari ibukota Kabupaten Bangka ke ibukota kabupaten lain adalah Toboali (Kabupaten Bangka Selatan) kemudian Muntok (Kabupaten Bangka Barat).

Tabel 3.2
Jarak Ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat)
ke Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Propinsi

No.	Dari Sungailiat ke Ibukota Kabupaten/Kota di Pulau Bangka	Jarak (Km)
1	Toboali	158
2	Muntok	140
3	Koba	90
4	Pangkalpinang	33

3.1.5 Sosial Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada Tahun 2012 adalah sebanyak 314.686 jiwa dengan kepadatan penduduk yakni 104 orang per Km². Jumlah ini meningkat 3,5 persen jika dibandingkan tahun 2011. Semakin tahun pertumbuhan penduduk masyarakat semakin tinggi, ini

menunjukkan bahwa tingkat harapan hidup yang dimiliki masyarakat semakin baik ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Kepadatan per Km² di Kabupaten Bangka Tahun 2012

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan
01. Sungailiat	52097	49035	101132	688
02. Belinyu	8818	7834	16652	39
03. Merawang	14741	13665	28406	203
04. Mendo Barat	15130	14027	29157	136
05. Pemali	9897	8911	18808	69
06. Puding Besar	25255	22887	48142	70
07. Bakam	24158	23040	47198	92
08. Riau Silip	13123	12068	25191	40
Jumlah/Total	163219	151467	314686	104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka

3.1.6 Pendidikan

Pada tahun 2012 berdasarkan data dari Dinas pendidikan Kabupaten Bangka tercatat di Kabupaten Bangka terdapat Sekolah Dasar(SD) sebanyak 175 unit yang terdiri dari SD Negeri 164 Unit dan SD

Swasta 11 Unit. Selain SD di Kabupaten Bangka juga ada SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) yang memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak-anak yang cenderung mengalami cacat (tuna), jumlah SDLB hingga tahun 2012 masih sebanyak 1 Unit.

Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendidikan SLTP sebanyak 38 unit yang terdiri dari SLTP negeri 28 unit dan SLTP swasta 10 unit. Sedangkan tingkat SLTA terdiri dari SMU 15 unit (SMU Negeri 8 unit dan SMU swasta 7 unit), SMK (STM) swasta 2 unit, SMK (SMEA) 7 unit (SMEA Negeri 4 unit dan SMEA swasta 3 unit)

3.1.7 Perhubungan

Kelancaran mobilisasi penduduk dan barang akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi mutlak harus dilaksanakan melalui pembangunan urusan wajib perhubungan.

Pembangunan perhubungan mengarahkan pencapaian sasaran kepada terwujudnya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan fasilitas pelayanan transportasi darat, laut, udara yang memadai. Pencapaian sasaran tersebut melalui implementasi program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan

bermotor, peningkatan pelayanan angkutan dan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

3.1.8 Pariwisata

Alasan dikembangkannya pariwisata di Kabupaten Bangka karena Bangka merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi perairan laut sebagai sumber hasil laut dan sebagai daerah pariwisata pantai. Hal ini ditunjang oleh lintasan perhubungan laut, udara yang potensial dan ekonomis.

Kabupaten Bangka merupakan potensi pariwisata yang cukup menarik seperti pantai, air panas, peninggalan sejarah, batu belubang dan gunung/perbukitan. Sebagai penunjang kegiatan tersebut Kabupaten Bangka terdapat 22 sarana hotel dan akomodasi yang terdiri dari 5 hotel berbintang dan 17 hotel/penginapan melati.

Pada tahun 2012 para wisatawan mancanegara yang datang dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang sebanyak 33 orang yang berasal dari, RRC 15 orang, Hongkong 2 orang, Jerman 7 orang, Amerika 1 orang, Thailand 7 orang dan Yunani 1 orang. Sedangkan jenis visa/izin tinggal yang mereka gunakan umumnya adalah visa kunjungan usaha, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan visa kunjungan sosial budaya.

3.1.8.1 Obyek Wisata Alam di Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka memiliki beberapa obyek wisata pantai yang menjadi daya tarik wisata, antara lain :

Tabel 3.4
Daftar Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
di Kabupaten Bangka

No.	Kecamatan	Wisata Alam
1	Sungailiat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Teluk Uber 2. Pantai Tanjung Pesona 3. Pantai Tanjung Belayar 4. Pantai Matras 5. Pantai Parai Tenggara 6. Pantai Batu Bedaun 7. Pantai Kuala 8. Pantai Batavia 9. Pantai Rebo 10. Pantai Tikus 11. Pantai Bakau 12. Hutan Wisata Suaka Alam 13. Bukit Siam 14. Minapolitan Jelitik
2	Pemali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Panas Tirta Tapta 2. Kolong Air Simpur
3	Merawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Air Anyir 2. Pantai Kuala 3. Sungai Baturusa 4. Pulau Sang Menawi 5. Hutan Lindung Wilson

		6. Bukit Sambung Giri
4	Puding Besar	1. Sungai Kotawaringin
5	Bakam	1. Sungai Layang
6	Belinyu	1. Pantai Kualo 2. Pantai Tanjung Penyusuk 3. Pantai Tanjung Gudang 4. Pantai Tanjung Putat 5. Pantai Simpang 6. Pantai Batu Dinding 7. Pantai Pejam 8. Pantai Pesaren 9. Pulau Putri 10. Pulau Lampu 11. Pulau Karang
7	Mendo Barat	1. Pantai Tanjung Raya Penagan 2. Pulau Medang 3. Pulau Antu
8	Riau Silip	1. Gunung Maras 2. Air Terjun Maras 3. Pantai Bedukang 4. Pulau Tiga

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 3.5
Daftar Hotel di Kabupaten Bangka

No.	Nama Hotel
1	2
1.	Parai Beach Resort & SPA
2.	Hotel Tanjung Pesona
3.	Novilla Boutique Resort

1	2
4.	Hotel Citra
5.	Hotel Teluk Uber
6.	City Garden Hotel
7.	Hotel Jati Pesona
8.	Hotel sejati
9.	St 12 Hotel
10.	Hotel Tri Mustika
11.	Pondok Wisata Moelya
12.	Penginapan Sederhana
13.	Wisma Flamboyan
14.	Wisma Jaya Bersama
15.	Golden Dragon
16.	Penginapan Indri
17.	Sam Pesaren
18.	Hotel Jatimas
19.	Penginapan 2004
20.	Penginapan 2009
21.	Hotel Aksi
22.	Wisma Timah II Belinyu

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka

Tabel 3.6
Daftar Restoran dan rumah makan di Kabupaten Bangka

Kecamatan	Jumlah restoran / rumah makan
1	2
Sungailiat	49
Pemali	12
Belinyu	11
Bakam	8

1	2
Pudding Besar	4
Riau Silip	7
Merawang	11
jumlah	102

Sumber: Disbudpar Kabupaten Bangka Tahun 2013

3.2 Gambaran Umum Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bangka

Prinsip otonomi daerah dilaksanakan dengan pemanfaatan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan / partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan otonomi daerah ada syarat yang diperlukan yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menggali pendapatan asli daerah tersebut serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, akan menciptakan konsekuensi yaitu semakin beratnya tanggung jawab daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang mengandalkan bidang pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan kas daerah nya perlu juga memperhatikan sarana dan prasarana pendukung yang dapat membuat para wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara menjadi betah dan ingin berkunjung kembali.

Salah satu sarana dan prasarana yang sangat menunjang bidang pariwisata adalah tempat menginap dan wisata kuliner yang dapat menunjukkan jati diri pemerintah melalui makanan khas yang disajikan.

Untuk itu, semakin lama semakin berkembang usaha perhotelan, baik itu hotel berbintang, hostel, motel, maupun wisma atau apa saja yang memberikan pelayanan menginap dalam jangka waktu yang pendek kepada para wisatawan yang berkunjung ke daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Wisata kuliner juga tak mau kalah dengan mengembangkan masakan khas lokal agar lebih dikenal masyarakat luar dengan memberikan sentuhan *modernisasi*, baik dalam tampilan nya, maupun cita rasanya, sehingga semakin menjamur pengusaha –pengusaha yang membuka usaha restoran maupun rumah makan yang tersebar hampir di seluruh daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabupaten Bangka sebagai kabupaten yang lebih senior dibandingkan dengan kabupaten lainnya juga semakin memperkokoh pencitraan sebagai daerah tujuan wisata alam yang bagus, ditambahkan

dengan prestasi dalam mendapatkan piala Adipura untuk yang ke 7 kalinya secara berturut – turut, semakin membuat nama Kabupaten Bangka melonjak tinggi dalam urusan pariwisata.

Sejak memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melaksanakan otonomi sendiri, diperkuat dengan keluarnya Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan bagi Provinsi kecil yang baru mulai menggerakkan roda pemerintahannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri

Lebih jelas dengan Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya yang ada di wilayah mereka sendiri.

Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menegaskan batasan – batasan yang jelas tentang jenis pemungutan pajak yang mana dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Pajak provinsi

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2. Pajak kabupaten/ kota

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten / Kota yang terdiri dari :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan

i. Pajak Sarang Burung Wallow

j. Pajak Restoran Perdesaan Dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan

Untuk pajak hotel dan pajak restoran yang ada di kabupaten Bangka, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah yang baru pada tahun 2005, dimana peraturan daerah tersebut memisahkan pajak hotel dan pajak restoran menjadi suatu peraturan daerah sendiri, karena peraturan daerah sebelumnya, pajak hotel dan pajak restoran disatukan pada satu peraturan daerah.

Dengan keluar nya peraturan daerah nomor 12 tahun 2005 mengenai pajak hotel dan peraturan daerah nomor 13 tahun 2005 mengenai pajak restoran, maka pengenaan pajak nya semakin jelas, baik itu untuk pajak hotel dan pajak restoran, karena telah diatur secara gamblang pada masing – masing peraturan daerah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak nya, baik pajak hotel maupun pajak restoran.

Sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2005, mengenai pajak hotel, telah dijelaskan secara detail mengenai apa itu pajak hotel, objek pajak hotel, subjek pajak hotel, besarnya pajak hotel, dan apa saja fasilitas pada hotel yang dapat dikenakan pajak.

Pada tahun 2012, di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah diajukan rancangan mengenai pengenaan pajak untuk rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar, namun tidak pada satu hamparan. Peraturan daerah sebelum nya hanya mengenakan pajak rumah kos pada kos – kosan yang memiliki 10 buah kamar pada satu hamparan, namun banyak masyarakat yang mengakali hal ini dengan mendirikan kos – kosan sejumlah kurang dari 10 kamar di kelurahan a, selanjutnya di kelurahan b mereka mendirikan kos – kosan lagi kurang dari 10 kamar dalam satu hamparan.

Secara hukum hal tersebut tidak dapat dituntut secara hukum, Karena dasar hukum sebelum nya yaitu Peraturan daerah nomor 12 tahun 2005 hanya menjelaskan objek pajak hotel salah satu nya adalah kos –

kosan yang berjumlah 10 kamar atau lebih dalam satu hamparan, perlu ditekankan disini hamparan yang dimaksudkan adalah dalam satu lingkungan atau lapangan bidang tanah yang menyatu, tidak terpisah.

Semakin tahun kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, salah satu yang menjadi penghambat adalah jarak yang cukup jauh dari rumah ke tempat kuliah, masyarakat sekitar kampus perkuliahan yang melihat peluang ini mulai berbondong – bondong mendirikan rumah kos – kosan di sekitar tempat tinggal mereka, dikarenakan padatnya masyarakat yang tinggal di wilayah itu, maka mereka hanya mampu membuat beberapa kamar yang kurang dari sepuluh kamar.

Namun di kelurahan sebelah nya, penulis beserta pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menemukan kos – kosan yang pemilik nya adalah si A dari kelurahan B, bila dijumlahkan jumlah kamar yang dimiliki oleh si A secara keseluruhan telah melebihi 10 kamar, namun karena tidak dalam satu hamparan, si A tidak dapat dikenakan pajak.

Selain itu, data yang penulis dapat kan dari beberapa sumber menunjukkan ketidakcocokan informasi yang diberikan, misalnya, data pengunjung setiap bulan yang di rekapitulasi menjadi data tahunan pengunjung yang menikmati pelayanan kamar di hotel yang terdaftar yang penulis dapat kan dari pengelola hotel tidak sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari Dinas Pariwisata.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk berperilaku jujur dan melaksanakan kewajibannya membayar pajak masih minim, sehingga masih perlu dilakukan intervensi dari pemerintah daerah kepada pengelola hotel yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka.

Dilihat dari kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang datang ke kabupaten Bangka dan menginap di hotel – hotel yang ada menunjukkan bahwa pariwisata dari Kabupaten Bangka semakin dikenal oleh masyarakat luar

Tabel 5.1
Daftar jumlah pengunjung hotel
selama tahun 2013

No.	Nama hotel	Wisatawan	
		Lokal	Mancanegara
1	2	3	4
1.	Parai Beach Resort & Spa	24569	84
2.	Hotel Tanjung Pesona	8350	23
3.	Novilla Boutique Resort	3599	2
4.	Hotel Citra	2157	2
5.	Hotel Teluk Uber	2274	1
6.	City Garden Hotel	1084	0
7.	Hotel Jati Pesona	2627	0
8.	Hotel Sejati	1413	2
9.	St 12 Hotel	148	0
10.	Hotel Tri Mustika	920	7

1	2	3	4
11.	Pondok Wisata Moelya	398	0
12.	Penginapan Sederhana	318	0
13.	Wisma Flamboyant	249	0
14.	Wisma Jaya Bersama	271	0
15.	Golden Dragon	479	0
16.	Penginapan Indri	2042	0
17.	Sam Pesaren	357	0
18.	Hotel Jatimas	931	0
19.	Penginapan 2004	738	0
20.	Penginapan 2009	1169	0
21.	Hotel Aksi	1566	0
22.	Wisma Timah II Belinyu	1044	0
Jumlah		56721	121

Sumber : DPPKAD kabupaten Bangka

Tabel 5.2
Daftar Restoran dan Rumah Makan
Di Kabupaten Bangka

kecamatan	Jumlah restoran / rumah makan
1	2
Sungailiat	49
Pemali	12

1	2
Belinyu	11
Bakam	8
Pudding Besar	4
Riau Silip	7
Merawang	11
jumlah	102

Sumber : Disbudpar Kabupaten Bangka

Dilihat dari jumlah hotel dan restoran yang ada, sudah dapat di perkirakan berapa besar nya pajak yang masuk ke kas daerah bila semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya setiap bulan. Namun dari tahun ke tahun, hanya pajak restoran dan rumah makan yang selalu memenuhi target penerimaan, sedangkan untuk pajak hotel, selalu kurang dari target penerimaan.

3.3 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 no. 217; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4033 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka seluruh Dinas yang ada di Bangka Belitung mengalami perombakan

besar-besaran, termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka dibentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Bangka nomor 20 tahun 2008. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan daerah serta di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.2.2 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penjelasan tugas – tugas dan tanggung jawab dari Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya,serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang – bidang

lain di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Penyiapan peraturan perundang – undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
- d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/ perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- f. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat terdiri dari :

- I. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan penanaman modal

II. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin
- c. Melaksanakan pembukuan keuangan
- d. Menyusun laporan keuangan rutin
- e. Memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

III. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar

- b. Kearsipan
- c. Rumah tangga dan perlengkapan
- d. Kepegawaian
- e. Keamanan kantor serta kenyamanan kerja

3. Bidang Perbendaharaan dan Laporan Keuangan

Bidang Perbendaharaan dan Laporan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka perumusan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan
- b. Menyiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan SP2D
- c. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- d. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka manajemen kas
- e. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Bidang Perbendaharaan dan Laporan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah

- b. Penyiapan bahan – bahan dalam rangka melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta pengumpulan bahan – bahan dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah
- d. Pelaksanaan dan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah
- e. Pengumpulan dan penyusunan laporan keuangan daerah
- f. Pengelolaan administrasi keuangan daerah
- g. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Kebijakan Umum APBD
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Prioritas dan plafond anggaran sementara beserta perubahannya
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan APBD dan perubahan APBD
- f. Mengendalikan dan menyiapkan bahan serta dokumen pelaksanaan APBD

Dalam melaksanakan tugas nya, bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- c. Pengumpulan bahan dan mengolah data pengesahan kebijakan umum APBD dan perubahan Kebijakan APBD
- d. Pengumpulan bahan dan mengolah data penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara beserta perubahannya
- e. Pengumpulan bahan dan mengolah data penyusunan APBD dan perubahan APBD

- f. Penyiapan bahan – bahan dalam rangka pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- g. Penyiapan bahan – bahan dalam rangka penetapan Surat Penyiapan Dana (SPD)
- h. Pengumpulan bahan dan mengolah data penyusunan Anggaran Kas
- i. Penyiapan bahan – bahan dalam rangka Pergeseran Anggaran
- j. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas dalam bidang tugasnya
- k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data aset daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan data aset daerah
- b. Pengembangan sistem informasi manajemen data aset daerah

- c. Penyusunan rencana dan program di bidang data aset daerah
- d. Pengaturan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah dan data aset daerah
- e. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas dalam bidang tugasnya
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengawasi, mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun program – program dan strategi peningkatan penerimaan Daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan sistem dan prosedur administrasi pendapatan asli daerah

yang dimulai dari pendataan, penetapan, pembukuan, penagihan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan

- c. Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
- d. Perencanaan penetapan besarnya target penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
- e. Penyusunan strategi serta kebijakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
- f. Pengendalian kebijakan, strategi sistem dan prosedur serta administrasi perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya
- g. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas dalam bidang tugasnya
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengawasi, mengendalikan kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- b. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen pengawasan dan pengendalian ketatausahaan pendapatan lain – lain
- c. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan ketatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak
- d. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas dalam bidang tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.2.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka

Visi adalah alasan filosofis keberadaan suatu lembaga atau organisasi yang berhubungan dengan gambaran umum apa yang terjadi dan menjadi arah atau pegangan bagi lembaga dalam mewujudkan cita-cita yang selaras, dan berkesinambungan. Adapun Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka tahun 2013-2018 yaitu :

” Terwujudnya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Optimal,Akuntable dan Akurat”

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mweujudkan visi. Dalam rangka

mewujudkan visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka maka dirumuskan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang perpajakan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Mewujudkan kebijakan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai alat untuk melakukan fungsi, alokasi, distribusi dan stabilitasi.
3. Meningkatkan efektifitas manajemen dan pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan keselarasan antar pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Meningkatkan penyediaan administrasi asset yang akurat.
6. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
7. Mewujudkan sistem informasi yang teritegrasi.
8. Meningkatkan penerimaan daerah dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak (WP).
9. Meningkatkan penyediaan prasarana, guna menunjang intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
10. Mewujudkan data dan informasi perpajakan yang konfrehensif, akurat, reliable, transparan dan dapat di akses oleh masyarakat.
11. Mewujudkan komunikasi, pengiriman data dan transaksi secara cepat, transparan, akuntable dan realible, antara DPPKAD dengan wajib pajak, juga antara DPPKAD dengan unit kerja sejenis di setiap kabupatyen/kota.

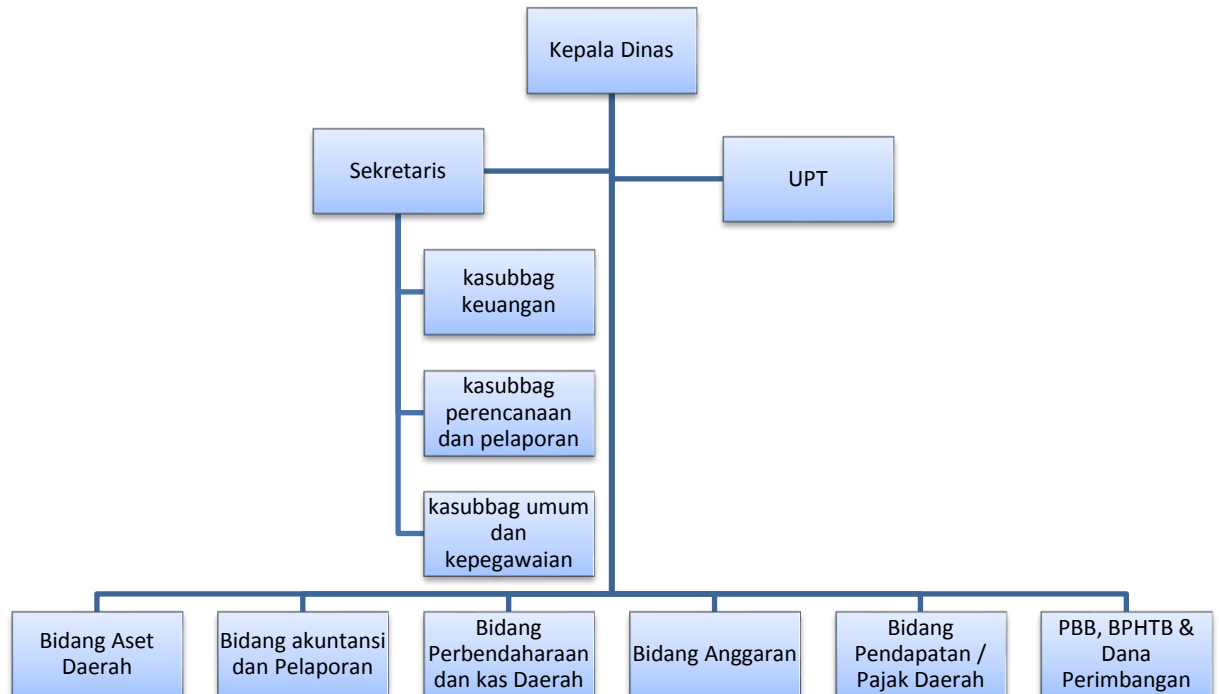
12. Meningkatkan pengelolaan data dan menginformasikan kepada masyarakat dan mitra kerja mengenai potensi serta peranan pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain terhadap pembangunan daerah.
13. Mengoptimalkan kerja sama dan hubungan dengan masyarakat (community development) yang berkompeten dengan meningkatkan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
14. Mewujudkan organisasi DPPKAD sebagai organisasi yang mau terus belajar (learning organization), beradaptasi dengan lingkungan, menerapkan teknik dan inovasi yang baru, dalam mewujudkan tujuan organisasi.

3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas untuk masing – masing unit organisasi yang ada.pada dasarnya struktur organisasi merupakan hal yang fundamental yang akan mengakibatkan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan.

3.2.3.1 Gambar Struktur Organisasi

Adapun bentuk bagan struktur organisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :



Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2013

3.2.3.2 Komposisi Pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka di bidang ekonomi khususnya perpajakan sangat tergantung pada sumber daya manusia penyelenggara yang dimiliki. Perekrutan dan penempatan kedudukan serta jabatan pegawai harus didasarkan atas latar belakang pendidikan. Jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka

berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka per 31 Oktober 2013

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	28	6	-	34
Diploma	-	15	5	-	20
Strata 1	-	-	50	3	53
Strata 2	-	-	1	-	1
Jumlah	-	43	62	3	108

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2013

Tabel 3.8
Daftar jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural dan fungsional

Jabatan Struktural	Jumlah
--------------------	--------

dan Fungsional	
a. Ess. II	1
b. Ess. III	7
c. Ess. IV	27
d. Non Ess.	73
Fungsional :	0
Total	108

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2013

3.2.5 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat

Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

3.3 Fenomena yang Diamati dan Dikaji

3.3.1 Lokasi Gedung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Gedung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka terletak di pusat perkantoran Kabupaten Bangka, karena merupakan pusat perkantoran Kabupaten Bangka, maka arus kegiatan yang terkait dengan dinas – dinas lain menjadi semakin efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan tugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dapat diselesaikan sesuai target. Adapun batas – batas yang mengelilingi Gedung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Polisi Lalu Lintas
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Inspektorat
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampus Universitas Bangka Belitung
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dinas kelautan dan perikanan

3.3.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Pelaksanaan pemungutan pajak yang terjadi di Kabupaten Bangka masih menerapkan cara – cara lama, yaitu pelaksanaan pemungutan oleh

petugas yang mendatangi wajib pajak, menjelaskan pajak yang harus dibayar dan melaksanakan penarikan pajak dari wajib pajak.

Pelaksanaan metode ini masih dilaksanakan oleh hampir setiap bagian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Budaya seperti ini seperti telah mendarah daging bagi seluruh petugas pelaksana pemungutan pajak hotel maupun pajak restoran.

Petugas pelaksana yang melakukan pemungutan hanyalah beberapa orang staff yang memang telah memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup mengenai pajak hotel dan restoran, sehingga selain sebagai petugas pemungutan, juga berperan sebagai petugas penyuluh bagi wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami hak – hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.